

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dasar hukum : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tanggal 29 Desember 2014

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1	Izin penanaman modal pada bidang usaha perusahaan jalan tol	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal - Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip untuk PMDN (Lintas Provinsi) formulir di Lampiran I-A Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 saat ini sudah online di online-spipise.bkpm.go.id <ol style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan data pemohon <ul style="list-style-type: none"> - rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan - rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan; atau - rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan b. Keterangan rencana kegiatan untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan 	<p>Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip bidang usaha perusahaan jalan tol adalah 3 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar</p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> c. Rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (jika dipersyaratkan) d. Permohonan ditandatangani di atas meterai oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon e. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup <p>2. Izin Prinsip untuk PMA formulir di Lampiran I-A Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 saat ini sudah online di online-spipise.bkpm.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon belum berbadan hukum Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah negara lain: melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedubes negara yang bersangkutan di Indonesia 2) Perseorangan asing: melampirkan rekaman lembar paspor yang masih berlaku 3) Badan usaha asing: melampirkan rekaman anggaran dasar dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah. 	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>4) Peserta Indonesia: perorangan (melampirkan KTP yang berlaku dan rekaman NPWP), badan hukum Indonesia (melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari MenkumHAM dan rekaman NPWP perusahaan).</p> <p>b. Pemohon telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk PT, melampirkan:</p> <p>1) Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari MenkumHAM dan NPWP perusahaan.</p> <p>2) Bukti diri pemegang saham (butir a huruf 1), 2), 3), 4))</p> <p>c. Keterangan rencana kegiatan; untuk sektor jasa (berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan)</p> <p>d. Rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (jika dipersyaratkan)</p> <p>e. Permohonan ditandatangani di atas meterai oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan</p>	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			sebagai pemohon f. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup	
			Izin Usaha untuk PMDN (Lintas Provinsi) dan PMA menggunakan formulir di Lampiran III-A Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 saat ini sudah online di: online-spipise.bkpm.go.id a. Rekaman perizinan berupa pendaftaran/ izin prinsip/ surat persetujuan penanaman modal/ izin usaha/ izin K/L yang telah dimiliki b. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan (jika ada) dari MenkumHAM dan NPWP perusahaan c. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari : 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa: a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau b) sertifikat Hak Atas Tanah, dan c) IMB 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka	Jangka waktu penerbitan Izin usaha perusahaan jalan tol adalah 7 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>waktu sewa:</p> <p>a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau</p> <p>b) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri</p> <p>c) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau</p> <p>3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:</p> <p>a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau</p> <p>b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,</p> <p>c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.</p> <p>hubungan afiliasi, mencakup:</p> <p>a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan, atau</p> <p>b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan</p>	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;</p> <p>d. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>e. Rekaman izin lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL</p> <p>f. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan)</p> <p>g. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PDPPM/PDKPM dan LKPM periode terakhir</p> <p>h. Rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (jika dipersyaratkan)</p> <p>i. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan</p> <p>j. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan jika pengurusan tidak dilakukan langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan</p>	
2	Izin penanaman modal pada bidang usaha perusahaan air minum	Sama dengan di atas	Sama dengan di atas	Sama dengan di atas

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
3	Izin usaha pembangunan dan perusahaan properti	Sama dengan di atas	Sama dengan di atas	Sama dengan di atas
4	Izin usaha jasa pelaksana konstruksi asing	Sama dengan di atas	<p>Sama dengan di atas</p> <p>Khusus untuk Pelaksana Konstruksi ditambahkan :</p> <p>k. data badan usaha atau <i>company profile</i>;</p> <p>l. rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), bagi perusahaan Penanaman Modal Asing dengan SBU kualifikasi usaha besar (<i>grade 7</i>) yang hanya dapat digunakan sebagai izin untuk melakukan pekerjaan konstruksi dengan kriteria pekerjaan kompleks, beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi;</p> <p>m. rekaman IMTA bila mempekerjakan tenaga kerja asing;</p> <p>n. rekaman identitas dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar serta daftar riwayat hidup penanggung jawab perusahaan;</p>	Sama dengan di atas
5	Izin usaha jasa konsultasi konstruksi asing	Sama dengan di atas	<p>Sama dengan izin usaha dari Izin penanaman modal pada bidang usaha perusahaan jalan tol, khusus untuk Konsultasi Konstruksi ditambahkan :</p> <p>k. data badan usaha atau <i>company profile</i>;</p> <p>l. rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK),</p>	Sama dengan di atas

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>bagi perusahaan Penanaman Modal Asing dengan SBU kualifikasi usaha besar (<i>grade 4</i>) yang hanya dapat digunakan sebagai izin untuk melakukan pekerjaan konstruksi dengan kriteria pekerjaan kompleks, beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi;</p> <p>m. rekaman IMTA bila mempekerjakan tenaga kerja asing;</p> <p>n. rekaman identitas dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar serta daftar riwayat hidup penanggung jawab perusahaan;</p>	
6	Izin usaha bidang perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal - Pemenpera No. 10 Tahun 2012 jo. No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang - Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 	Sama dengan di atas	Sama dengan di atas

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
7	Izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2014 	a. Izin baru BUJKA Pelaksana Konstruksi: USD 10.000; Konsultan Konstruksi: USD 5.000 <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Surat Kuasa Pengurusan (Bila diwakilkan) - Rekaman Akta Pendirian BUJKA - Data Umum BUJKA - Rekomendasi Kedutaan BUJKA - copy IUJK BUJKA di negara asal - Copy sertifikat penyetaraan dari Lembaga - Daftar Pengalaman BUJKA 10 Tahun Terakhir - Surat Penunjukan Kepala Perwakilan - Laporan Keuangan BUJKA - Copy Paspor atau KTP calon kepala Perwakilan - CV Kepala Perwakilan - Surat Keterangan Domisili - Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen - Surat Pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat di tempat lain 	Jangka waktu penerbitan Izin Baru BUJKA adalah 10 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>b. Perpanjangan izin BUJK Pelaksana Konstruksi: USD 10.000; Konsultan Konstruksi: USD 5.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Data Umum BUJKA - Rekomendasi Kedutaan BUJKA - copy IUJK BUJKA di negara asal - Copy Paspor atau KTP calon kepala Perwakilan - Surat Keterangan Domisili - Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen - Izin Perwakilan Asli - Tanda Terima laporan Tahunan laporan tahunan Selama 3 Tahun - NPWP Perwakilan BUJKA yang bersangkutan - Rekaman Bukti Pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk setiap Proyek Konstruksi - Sertifikat Penyetaraan oleh lembaga <p>c. Penutupan izin BUJK (free)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Izin Perwakilan Asli - Surat pajak nihil 	<p>Perpanjangan Izin BUJKA adalah 10 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar</p> <p>Jangka waktu penerbitan Penutupan Izin BUJKA adalah 10 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar</p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>d. Ganti data izin BUJK (free)</p> <p><i>Badan Usaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Izin Perwakilan Asli - copy akta BUJKA - Rekomendasi Kedutaan - Surat Keterangan Domisili - Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen <p><i>Alamat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Izin Perwakilan Asli - copy akta BUJKA - Rekomendasi Kedutaan - Surat Keterangan Domisili - Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen <p><i>Jenis Usaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Izin Perwakilan Asli - Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen - Sertifikat Penyetaraan oleh lembaga <p><i>Kepala Perwakilan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Izin Perwakilan Asli - Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen - Surat Penunjukan Kepala Perwakilan - CV Kepala Perwakilan 	<p>Jangka waktu penerbitan Ganti Data Izin BUJKA adalah 10 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar</p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> - EPO Kepala Perwakilan lama - Copy Paspor dan KTP Kepala Perwakilan e. Surat Pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat di tempat lain 	